



Para siswa di Sekolah Kabupaten Lumajang berpartisipasi aktif dalam permainan edukasi mengenai perubahan iklim secara berkelompok (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Belajar di Kabupaten Lumajang: Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Lumajang: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Lumajang belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Lumajang meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (khususnya berbasis gender) di sekolah, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal melibatkan semua lapisan masyarakat.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 36,31; perempuan 38,79

Numerasi : Laki-laki 28,89; perempuan 29,38

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 4-6 poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Lumajang, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Lumajang pada Mei 2025.

Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 1-4 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Kekerasan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, bahkan beberapa guru menjadi pelaku kekerasan seksual. Sementara, sebagian besar korban dari kasus-kasus tersebut adalah murid perempuan. Pihak sekolah dan murid biasanya melakukan kesepakatan, sehingga kasus kekerasan seringkali tidak dilaporkan ke polisi.

Selain itu, sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang masih melegalkan perkawinan anak. Praktik ini merugikan murid perempuan karena membuat mereka rentan putus sekolah, mengalami masalah kesehatan, dan menjadi korban kekerasan.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 1.728 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 1% tidak sekolah dan 99% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusif (82%), sekolah inklusi (8%), atau sekolah luar biasa/SLB (9%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan tenaga pendukung (guru pendamping dan terapis) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali dikucilkan.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid di daerah terpencil, murid terlibat dalam perkawinan anak, murid harus bekerja, serta murid dengan orang tua merantau (pekerja migran).



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Lumajang mencapai 131,03 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Jawa Timur (118,61), tetapi masih di bawah indeks Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, kabupaten ini berisiko sedang mengalami tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tsunami.

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Misalnya, aturan penggunaan plastik sekali pakai, subsidi dan imbauan penggunaan transportasi publik, serta program Masyarakat Mandiri Sampah (Mama Risa). Beberapa sekolah pun sudah memperkenalkan dan membiasakan perilaku ramah lingkungan dan skema evakuasi bencana pada guru dan murid. Namun, langkah ini baru menjadi kesadaran dan pengetahuan sebagian komunitas, belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpenciran, migrasi, bahasa, dan gender—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan, kerentanan terhadap kekerasan, dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Kemiskinan dan absensi orang tua

Anak-anak dengan orang tua pekerja migran umumnya mengalami kesulitan ekonomi serta kurang mendapat pengawasan dan perlindungan orang tua. Hal ini membuat mereka tidak memiliki sistem pendukung yang kuat dan mampu meningkatkan akses pendidikan mereka.



Perkawinan anak

Perkawinan anak yang didorong oleh faktor ekonomi dan budaya merupakan salah satu penyebab anak perempuan putus sekolah, mengalami masalah kesehatan, dan menjadi korban kekerasan.



Siswa-siswi di sekolah Kabupaten Sidoarjo belajar secara kolaboratif melalui permainan untuk mengenal konsep perkalian
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan & Kantor Kementerian Agama: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Memperluas sosialisasi program Sekolah Ramah Anak, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan implementasi program, yang berdampak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di sekolah.
2. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi program pencegahan kekerasan (pendidikan karakter dan tindakan disiplin positif), mengawasi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengupayakan pembentukan peraturan bupati tentang penyelenggaraan sekolah inklusif—sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak (AYL) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Regulasi ini dapat meningkatkan akses pendidikan dan penerimaan murid penyandang disabilitas di sekolah.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard Profil Belajar Siswa (PBS)*, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Memastikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten berjalan secara optimal agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Langsung Tunai) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mengupayakan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan (seperti penggunaan plastik sekali pakai, pengolahan sampah menjadi kompos, program Mama Risa, serta program Sekolah Berkarakter, Sehat, Aman, Rapi, dan Inovasi/Sekarsari), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital. Dengan begitu, kebijakan dan program tersebut bisa dipahami masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku mereka.
3. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperluas penyelenggaraan program Belajar Ilmu Kebencanaan Sejak Dini (BELI NASI) dan merancang skema evakuasi bencana di sekolah, juga memperkuat koordinasi dan respons terhadap bencana.